

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1 Letak Geografis**

Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas lebih kurang 8.915.016 Ha (89.150 Km<sup>2</sup>), Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka terletak antara 01° 05' 00" Lintang Selatan - 02° 25' 00" Lintang Utara atau antara 100° 00' 00" - 105° 05' 00" Bujur Timur. Disamping itu sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat wilayah lautan sejauh 12mil dari garis pantai. Di daratan terdapat 15 sungai, diantaranya ada 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 -12 m, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan Bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.

Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan negara tetangga dan provinsi lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- b. SebelahSelata : ProvinsiJambidanProvinsiSumateraBarat
- c. SebelahTimur : ProvinsiKepulauanRiaudanSelatMalaka
- d. SebelahBarat : ProvinsiSumateraBaratdanSumateraUtara.

#### **4.2 Kondisi Demografis**

Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dilaksanakan pada bulan Mei 2010. Jumlah penduduk Provinsi Riau menurut hasil olah cepat SP 2010 tercatat sebesar 5 543 031 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 2 854 989 jiwa dan 2 688 042 jiwa penduduk perempuan. Sementara banyaknya rumah tangga yang terdapat di Provinsi Riau pada tahun 2010 tercatat 1 337 034 rumah tangga dengan rata-rata penduduk 4 jiwa per rumah tangga. Masih berdasarkan hasil olah cepat SP 2010, distribusi penduduk menurut kabupaten/kota menunjukkan bahwa penduduk Riau terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi dengan jumlah penduduk 903 902 jiwa atau sekitar 16,31 persen dari seluruh penduduk Riau. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 176 371 jiwa.

Sensus Penduduk (SP) dilaksanakan 10 tahun sekali. Dan berdasarkan data SP, jumlah penduduk Riau tahun 2009 diproyeksikan berjumlah 5 306 533 jiwa, yang terdiri dari 2 794 617 laki-laki dan 2 511 916 perempuan. Pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Riau 9,45 persen, berkurang dibanding tahun 2008. Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat melalui kebijakan-kebijakannya. Transmigrasi merupakan program pemerintah dalam usaha pemerataan penduduk. Hingga tahun 2008, Provinsi Riau masih menjadi daerah tujuan transmigrasi. Pada tahun 2008 realisasi penempatan Transmigran di Provinsi Riau adalah 150 kepala keluarga atau 610 jiwa, berasal dari APPDT dan Provinsi Jawa Tengah. Ketenagakerjaan Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan (supply) tenaga kerja.

Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran. Pada table 4.2.2 hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2009 (Sakernas 2009) menunjukkan bahwa di Provinsi Riau komposisi

antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja untuk penduduk berusia 15 tahun keatas tidak jauh berbeda di semua kabupaten/kota. Angkatan kerja penduduk laki-laki jauh lebih banyak dibanding bukan angkatan kerja.

Sementara pada penduduk perempuan, bukan angkatan kerja justru lebih banyak dibanding angkatan kerja, yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga. Kabupaten dengan persentase angkatan kerja terbesar adalah Indragiri Hilir dan Pelawan, masing-masing sebesar 66,75 persen dan 66,92 persen. Sedangkan nilai persentase angkatan kerja terkecil adalah Rokan Hilir dan Rokan Hulu, masing-masing sebesar 57,83 persen dan 59,64 persen. Dari total angkatan kerja yang bekerja, ternyata sebagian besarnya terserap di sektor Pertanian (49,30 persen), diikuti oleh sektor Perdagangan, rumah makan, dan hotel serta jasa-jasa, masing-masing sebesar 17,58 persen dan 13,50 persen. Pada tahun 2010, PNS yang menjadi peserta aktif Taspen berjumlah 98 916 orang yang terdiri dari PNS Pusat sebanyak 12 489 orang(12,63 persen), PNS Daerah Otonom sebanyak 86 401 orang (87,34 persen), dan Pejabat Negara sebanyak 26 orang (0,03 persen). Pejabat Negara di setiap wilayah terdapat dua orang yaitu kepala daerah dan wakilnya. Jumlah pensiunan keadaan bulan September 2010 adalah 28 395 orang atau meningkat 1,26 persen dari 28 043 orang pada September 2009. Sementara pembayaran pensiunan yang dilakukan oleh Taspen meningkat 1,53 persen dari tahun sebelumnya.

#### **4.3 Suku Bangsa**

Penduduk provinsi Riau terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Mereka terdiri dari Jawa (25,05%), Minangkabau (11,26%), Batak (7,31%), Banjar (3,78%), Tionghoa (3,72%), dan Bugis (2,27%). Suku Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan komposisi 37,74% dari seluruh penduduk Riau. Mereka umumnya berasal dari daerah pesisir di Rokan Hilir, Dumai,

Bengkalis, Kepulauan Meranti, hingga ke Pelalawan, Siak, Inderagiri Hulu dan Inderagiri Hilir. Namun begitu, ada juga masyarakat asli bersuku rumpun Minangkabau terutama yang berasal dari daerah Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan sebagian Inderagiri Hulu. Juga masyarakat Mandailing di Rokan Hulu, yang lebih mengaku sebagai Melayu daripada sebagai Minangkabau ataupun Batak.

Abad ke-19, masyarakat Banjar dari Kalimantan Selatan dan Bugis dari Sulawesi Selatan, juga mulai berdatangan ke Riau. Mereka banyak bermukim di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Tembilahan. Di bukanya perusahaan pertambangan minyak Caltex pada tahun 1940-an di Rumbai, Pekanbaru, mendorong orang-orang dari seluruh Nusantara untuk mengadu nasib di Riau.

Suku Jawa dan Sunda pada umumnya banyak berada pada kawasan transmigran. Sementara etnis Minangkabau umumnya menjadi pedagang dan banyak bermukim pada kawasan perkotaan seperti Pekanbaru, Bangkinang, Duri, dan Dumai. Begitu juga orang Tionghoa pada umumnya sama dengan etnis Minangkabau yaitu menjadi pedagang dan bermukim khususnya di Pekanbaru, serta banyak juga terdapat pada kawasan pesisir timur seperti di Bagansiapiapi, Selatpanjang, Pulau Rupat dan Bengkalis.

Selain itu di provinsi ini masih terdapat sekumpulan masyarakat asli yang tinggal di pedalaman dan pinggir sungai, seperti Orang Sakai, Suku Akit, Suku Talang Mamak, dan Suku Laut.

#### **4.3.1 Bahasa**

Bahasa pengantar masyarakat provinsi Riau pada umumnya menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu umumnya digunakan di daerah-daerah pesisir seperti Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan di sekitar pulau-pulau. Bahasa Minang secara luas juga digunakan oleh penduduk di provinsi ini, terutama oleh para penduduk asli di daerah Kampar, Kuantan Singingi, dan Rokan Hulu yang berbudaya serumpun Minang serta para pendatang asal Sumatera Barat. Selain itu Bahasa Hokkien juga masih banyak digunakan di kalangan masyarakat Keturunan Tionghoa, terutama yang bermukim di daerah seperti Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagansiapiapi. Dalam skala yang cukup besar juga didapati penutur Bahasa Jawa yang digunakan oleh keturunan para pendatang asal Jawa yang telah bermukim di Riau sejak masa penjajahan dahulu, serta oleh para transmigran dari Pulau Jawa pada masa setelah kemerdekaan. Di samping itu juga banyak penutur Bahasa Batak di kalangan pendatang dari Provinsi Sumatera Utara.

#### **4.3.2 Agama**

Dilihat dari komposisi penduduk provinsi Riau yang penuh kemajemukan dengan latar belakang sosial budaya, bahasa, dan agama yang berbeda, pada dasarnya merupakan aset bagi daerah Riau sendiri. Agama-agama yang dianut penduduk provinsi ini sangat beragam, diantaranya Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

#### **4.4 Ekonomi dan Keuangan**

Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Perekonomian Riau yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 mencapai Rp.123.371,15 milyar Ekonomi Riau dengan migas tahun 2012, mengalami pertumbuhan sebesar

minus (konstraksi) 0,26 persen dibanding triwulan sebelumnya (q-to-q). Konstraksi terjadi di lima sektor lapangan usaha. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada sektor Bangunan sebesar 2,99 persen. Sementara sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi tertinggi sebesar 0,89 persen. Kedua sektor tersebut masing-masing memberikan sumber pertumbuhan sekitar 0,18 persen dan -0,40 persen.

**Tabel IV.1**

**Laju Pertumbuhan PDRB Riau Menurut Lapangan Usaha (Dengan Migas) Triwulan IV 2012 dan Januari – Desember 2012 (Persen)**

Lapangan Usaha	Trw IV 2012 Thd Trw IV 2011 (y- on-y)	Sumber Pertum- buhan (y-on- y)	Trw IV 2012 thd Trw III 2012 (q- to-q)	Sumber Pertum- buhan (q-to-q)	Jan-Des 2012 Thd Jan-Des 2011 (c- to-c)	Sumber Pertumb- uhan (c- to-c)
• Pertanian, perkebunana, peternakan, kehutanan, dan perikanan	1,21	0,20	-0,75	-0,13	2,46	0,42
• Pertambangan dan Penggalian	-2,97	-1,39	-0,89	-0,40	-0,91	-0,43
• Industri Pengolahan	0,39	0,05	-0,52	-, 0,06	3,14	0,36
• Listrik,Gas dan Air Bersih	3,19	0,01	-0,33	0,0	3,64	0,01
• Bangunan	13,58	0,55	2,99	0,13	14,13	0,55
• Perdagangan, Hotel, dan Restoran	18,18	1,81	0,78	00 ,09	16,02	1,55

• Pengangkutan dan Komunikasi	12,84	0,43	-0,52	-0,02	12,03	0,39
• Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	13,36	0,21	1,64	0,03	14,21	0,21
• Jasa – Jasa	9,12	0,51	1,76	0,10	9,12	0,50
PDRB	2,37	2,37	-0,26	-0,26	3,55	3,55

Sumber: BPS RIAU 2013

Kondisi Keuangan Provinsi Riau Pada tahun 2012 dapat dilihat dari jumlah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Riau. Jumlah nominal anggaran belanja daerah tercatat sebesar Rp4.159,68 miliar dengan realisasi belanja sebesar Rp3.649 miliar. Sementara itu dari sisi pendapatan daerah, tercatat anggaran sebesar Rp6.514,43 miliar dengan jumlah nominal realisasi pendapatan sebesar Rp2.522,68 miliar.

Selain itu, jumlah nominal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segi Bagian Laba Usaha Daerah tercatat sebesar Rp2.181,22 juta. Kemudian jumlah Pendapatan lain-lain sebesar Rp1.393,01, diikuti dengan Pajak Daerah sebesar Rp1.914,89 juta, dan Retribusi Daerah sebesar Rp1.839,78 juta. Sehingga Rasio PAD terhadap APBD tahun 2012 tercatat sebesar 32,85%.

**Tabel IV.2**

**Jumlah APBD dan PAD Provinsi Riau tahun 2012**

SUMBER DANA	JUMLAH
APBD(Rp)	
Belanja	4.159,68 M
Pendapatan	6.514,43 M

Realisasi Belanja	3.649 M
Realisasi Pendapatan	2.522,68 M
Total PAD (Rp)	
Bagian Laba Usaha Daerah	2.181,22 Jt
Lain-lain Pendapatan	1.393,01 Jt
Pajak Daerah	1.914,89 Jt
Retribusi Daerah	1.839,78 Jt
Rasio PAD Terhadap APBD	32,85%

Sumber: BPS RIAU 20

**Tabel IV.3**

**Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau**

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Sampel</b>
1.	Kab. Bengkalis	
2.	Kab. Indragiri Hilir	
3.	Kab. Indragiri Hulu	
4.	Kab. Kampar	
5.	Kab. Kuantan Singingi	
6.	Kab. Pelalawan	
7.	Kab. Rokan Hilir	
8.	Kab. Rokan Hulu	
9.	Kab. Siak	
10.	Kab. Kepulauan Meranti	
11.	Kota Dumai	
12.	Kota Pekanbaru	

Sumber: [www.djpkdepkeu.go.id](http://www.djpkdepkeu.go.id)



